

Kajian Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Menghadapi Alih Fungsi Lahan di Kelurahan Ciumbuleuit

Muhammad Yusuf Fauzan^{*}, Ernady Syaodih, Saraswati saraswati

Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

^{*}myfauzan35@gmail.com, ernadysyaodih@yahoo.com, saraswati@unisba.ac.id

Abstract. The development of urban areas is a phenomenon that occurs due to the rapid development of the population and human mobility. Sustainable Development Goals (SDGs) are a long-term world program to optimize all the potential and resources owned by each country. Land conversion is the change in the function of part or all of the land area from its original function to another function. As happened in Ciumbuleuit Village, there is a lot of agricultural land and even conservation land that has changed its land function to become a residential area. This is the reason behind the author conducting a study on the role of the government and society in dealing with land conversion. This study aims to see the impacts that occur due to land conversion and how much role the government and the community play in suppressing land conversion. The method used is descriptive qualitative with the MACTOR analysis method. Based on the results of the MACTOR analysis, actors who play an important role in handling land function change in Ciumbuleuit Village are the Bandung City Bappelitbang with a value of 39.8, the Bandung City National Land Agency with a value of 32.1 and the Bandung City Copyright, Construction Development, and Spatial Planning Office with a value of 20.4. Meanwhile, the main objectives that have the highest approval value are Increasing Public Awareness with a value of 23.2, Increasing Socialization of Spatial Allocation with a value of 21.2 and Suppressing RTH Land Conversion with a value of 20.7.

Keywords: *Sustainable Development Goals (SDGs), MACTOR.*

Abstrak. Perkembangan wilayah kota merupakan satu fenomena yang terjadi karena pesatnya perkembangan penduduk dan mobilitas manusia. Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan suatu program dunia jangka panjang untuk mengoptimalkan semua potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh tiap negara. Alih fungsi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula menjadi fungsi lain. Seperti yang terjadi di Kelurahan Ciumbuleuit banyak sekali lahan pertanian bahkan lahan konservasi yang beralih fungsi lahan menjadi Kawasan permukiman. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis melakukan kajian mengenai peran pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi alih fungsi lahan. Studi ini bertujuan untuk melihat dampak yang terjadi akibat alih fungsi lahan dan seberapa besar peran pemerintah dan masyarakat dalam menekan adanya alih fungsi lahan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan metode analisis MACTOR. Berdasarkan hasil analisis MACTOR aktor yang berperan penting dalam menangani alih fungsi lahan di Kelurahan Ciumbuleuit adalah Bappelitbang Kota Bandung dengan nilai 39.8, Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung dengan nilai 32.1 dan Dinas Cipta Karya, Bina Kontruksi, dan Tata Ruang Kota Bandung dengan nilai 20.4. Sedangkan tujuan utama yang memiliki nilai ketersetujuan tertinggi adalah Peningkatan Kesadaran Masyarakat dengan nilai 23.2, Peningkatan Sosialisasi Peruntukkan Ruang dengan nilai 21.2 dan Menekan Alih Fungsi Lahan RTH dengan nilai 20.7.

Kata Kunci: *Sustainable Development Goals (SDGs), MACTOR.*

A. Pendahuluan

Perkembangan sebuah kota tidak dapat dihindari, baik itu di bidang ekonomi, sosial & budaya. Perkembangan kota ini dapat ditunjukkan oleh pertumbuhan penduduk dan peningkatan aktivitas yang ada di dalamnya (Dwiyanto & Sariffuddin, 2013). Perkembangan wilayah kota merupakan satu fenomena yang terjadi karena pesatnya perkembangan penduduk dan mobilitas manusia. Hal tersebut mendorong makin meningkatnya penggunaan lahan. (Yunus, 2000).

Sustainable Development Goals (SDGs) memiliki 17 poin tujuan dalam pelaksanaannya, tujuan nomor 15 berkaitan dengan konsep “Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati” yang dapat kita artikan sebagai suatu kawasan harus seimbang dalam menentukan peruntukan lahan sehingga ekosistem yang ada di wilayah tersebut akan terjaga, juga untuk menghindari alih fungsi lahan.

Tujuan Pengelolaan Lahan Berkelanjutan *Sustainable Land Management* adalah untuk menyelaraskan tujuan yang saling melengkapi dalam memberikan peluang lingkungan, ekonomi, dan sosial untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang, sambil mempertahankan dan meningkatkan kualitas sumber daya alam (tanah, air dan udara). (Smyth dan Dumanski, 1993).

Meluasnya perkembangan Kawasan Bandung Utara menunjukkan status yang mengkhawatirkan. Meskipun proporsi perkotaan telah mencapai lebih dari 70% dan Kawasan Bandung Utara diidentifikasi sebagai kawasan lindung yang memberikan perlindungan lingkungan dan air, namun memiliki dampak ekologi, dan sosial ekonomi bagi masyarakat di Kawasan Bandung Utara (Sagita, 2016). Tingkat kerentanan KBU terhadap perubahan tata guna lahan sangat tinggi karena tingginya laju pembangunan pusat-pusat pertumbuhan Kawasan Bandung Utara (Hernawan et al., 2009).

Sebagian dari Kelurahan Ciumbuleuit merupakan tanah Ex- erpacht yang merupakan peninggalan zaman kolonial yang sebagian besar merupakan wilayah konservasi yang harus di lindungi. Beberapa kawasan tersebut sudah mengalami alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan sendiri dapat mengakibatkan dampak positif maupun negatif. Dampak positif dari adanya alih fungsi lahan adalah meningkatnya ekonomi masyarakat sekitar karena adanya bangkitan, sedangkan bencana longsor merupakan salah satu dampak negatif yang diakibatkan dari adanya alih fungsi lahan yang ada di Kelurahan Ciumbuleuit. Lokasi yang rawan sekali adanya gerakan tanah di Kawasan RW 10 yang di dominasi kemiringan lereng yang curam. Hal ini juga diperburuk dengan kurangnya daerah resapan air dan wilayah untuk menahan Gerakan tanah sehingga jika musim penghujan tiba masyarakat harus lebih waspada dengan adanya bencana longsor ini.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh perubahan fungsi lahan kawasan utara Bandung sangat besar, karena kurang optimalnya pemerintah dalam melakukan pengendalian pemanfaatan ruang. Dari fenomena yang telah di jabarkan di Kelurahan Ciumbuleuit serta dikaitkan dengan tujuan dari Sustainable Development Goals (SDGs) diatas cukup mendukung suatu penelitian untuk menjalankan tujuan SDG’s “Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati.” Demi terciptanya Kota Bandung yang tertib dalam pemanfaatan ruang. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

Mengetahui peran pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi alih fungsi lahan serta memberikan masukan upaya peningkatan peran pemerintah dan masyarakat dalam menangani fenomena alih fungsi lahan di Kelurahan Ciumbuleuit;

B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan metode analisis *MACTOR* dengan menggunakan pendekatan normatif. Populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah aktor yang terlibat dalam menangani adanya fenomena alih fungsi lahan di Kelurahan Ciumbuleuit yang berjumlah 11 responden. Dengan

teknik pengambilan sampel yaitu *Purposive Sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, observasi, dan studi pustaka.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dari adanya identifikasi aktor dan tujuan tersebut dapat dinilai tingkat pengaruh aktor sampai dengan mengukur sikap aktor terhadap tujuan yang akan dicapai tersebut. Sehingga, dapat dihasilkan *output* akhir yaitu Hubungan Aktor-Tujuan dalam menangani dampak alih fungsi lahan di Kelurahan Ciumbuleuit yang diinterpretasikan menjadi sebuah tabulasi mulai dari aktor yang paling berpengaruh dan kurang berpengaruh. Selain itu, tabulasi akhir juga dilakukan untuk mengetahui tujuan-tujuan utama yang dapat dijadikan sebagai program utama pada penanganan dampak alih fungsi lahan di Kelurahan Ciumbuleuit.

Dalam menangani permasalahan kota seperti dampak alih fungsi lahan di Kelurahan Ciumbuleuit diperlukannya peran *stakeholder* terutama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat. Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah melakukan upaya untuk meminimalisir dampak negatif yang timbul. Hasil akhir dari analisis MACTOR dapat dilihat pada Tabel 1 Matriks Hubungan Tujuan-Aktor (3MAO) dalam Menangani Dampak Alih Fungsi Lahan di Kelurahan Ciumbuleuit.

Tabel 1. Matriks Hubungan Tujuan-Aktor (3MAO) dalam Menangani Dampak Alih Fungsi Lahan Di Kelurahan Ciumbuleuit

3MAO	PSTMTPR	MAK	PKMDMAFL	PPM	MPFLP	MPPP	MKAO PD	PSDMAFL	MTTK	MPHUPL	Mobilisation
BAPPELIT	4,0	-4,0	6,0	-2,0	4,0	-2,0	4,0	4,0	4,0	6,0	39,8
DPKP3	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3	-1,1	1,1	-1,1	2,3	-1,1	18,3
CIPTABINTA	3,1	-1,6	3,1	-1,6	1,6	-1,6	1,6	3,1	1,6	1,6	20,4
DKPP	2,3	-1,2	2,3	-1,2	3,5	-1,2	2,3	2,3	1,2	1,2	18,5
BPN	3,4	-1,7	3,4	-3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	32,1
DLHK	2,6	-1,3	2,6	2,6	-1,3	2,6	2,6	1,3	1,3	-1,3	19,9
KEC	0,9	0,9	0,9	1,8	1,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	11,0
KEL	0,8	1,5	0,8	0,8	0,8	1,5	1,5	1,5	2,3	0,8	12,1
LPM	0,3	0,7	0,3	0,3	-0,3	0,3	0,7	0,3	1,4	1,4	6,1
TARKA	0,4	0,4	0,4	-0,4	0,4	-0,4	0,9	0,4	0,9	0,4	5,2
TM	0,3	0,7	0,3	0,3	-0,7	0,3	0,7	0,3	0,3	-0,3	4,4
PNH	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	6,7
Number of agreements	18,3	4,2	20,2	5,9	15,4	9,1	19,7	17,7	19,5	15,6	
Number of disagreements	-3,0	-12,7	-3,0	-11,5	-5,3	-7,0	-0,7	-1,8	-0,7	-3,5	
Degree of mobilisation	21,2	16,9	23,2	17,4	20,7	16,1	20,4	19,5	20,1	19,0	

© LIPSOR-EPIT-A-MACTOR

Sumber: Hasil Analisis MACTOR, 2022

Identifikasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berperan dalam penanganan dampak alih fungsi lahan di Kelurahan Ciumbuleuit

Dari hasil akhir analisis MACTOR diatas dapat diketahui urutan aktor yang paling berpengaruh. Hal tersebut ditunjukkan pada kolom "*mobilisation*" yaitu urutan nilai tertinggi sampai dengan nilai terendah menunjukkan aktor yang paling berpengaruh sampai aktor yang kurang berpengaruh. Hasil urutan aktor yang memiliki pengaruh tertinggi sampai dengan terendah dapat dilihat pada Tabel 2. Urutan Aktor dalam Menangani Dampak alih fungsi lahan di Kelurahan Ciumbuleuit.

Tabel 2. Urutan Aktor dalam Menangani Dampak Alih Fungsi Lahan Di Kelurahan Ciumbuleuit

Ra ng ki ng	Aktor	Nilai <i>Mobilisation</i>	Keterangan
1	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung	39,8	Sebagaimana fakta dilapangan bahwa peran Bappelitbang ini adalah sebagai eksekutor atau aktor utama yang menetapkan suatu kebijakan lingkup perencanaan pembangunan serta pengembangan kota.
2	Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung	32,1	Dilihat kondisi dilapangan Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung terlibat dalam melakukan pertimbangan teknis pertanahan untuk menghindari adanya alih fungsi lahan pertanian terutama lahan milik Pemerintah Daerah
3	Dinas Cipta Karya, Bina Kontruksi, dan Tata Ruang Kota Bandung	20.4	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang (Ciptabintar) Kota Bandung dalam menangani dampak dari alih fungsi lahan di Kelurahan Ciumbuleuit dilibatkan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan terkait penataan ruang perkotaan terutama dalam penyusunan dokumen rencana tata ruang.
4	Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung	19,9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung dalam menangani dampak alih fungsi lahan di Kelurahan Ciumbuleuit adalah untuk menekan adanya perubahan bentuk ruang yang akan mengakibatkan dampak pada lingkungan sekitar.
5	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung	18,5	Peran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung dalam menangani permasalahan ini yaitu mempertahankan lahan konservasi yang ada di Kelurahan Ciumbuleuit
6	DPKP3 Kota Bandung	18,3	Bentuk keterlibatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung adalah melakukan penyeimbangan antara kebutuhan rumah dengan kebutuhan fasilitas sarana dan prasarana penunjang lainnya.
7	Kelurahan Ciumbuleuit	12,1	Kelurahan Ciumbuleuit sendiri merupakan aktor terdepan dalam menangani alih fungsi lahan yang dapat melakukan kontroling secara berkala sehingga mengurangi adanya alih fungsi lahan yang berdampak negatif.
8	Kecamatan Cidadak	11,0	Kecamatan Cidadak pengaruh yang cukup signifikan yaitu melakukan koordinasi langsung dengan lingkup kewilayahan dalam penyelenggaraan teknis terkait perencanaan, pembangunan, ataupun administrasi wilayah. Dan mengawasi kinerja Kelurahan Ciumbuleuit
9	Pengusaha	6,7	Pengusaha dalam penelitian ini sebagai bagian dari masyarakat yang membantu stakeholder pemerintah dalam mengatasi adanya alih fungsi lahan di kewilayahan.

Rangking	Aktor	Nilai Mobilisation	Keterangan
10	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	6,1	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam penelitian ini sebagai bagian dari masyarakat yang membantu stakeholder pemerintah dalam mengatasi adanya alih fungsi lahan di kewilayahan.
11	Karang Taruna	5,2	Karang Taruna dalam penelitian ini sebagai bagian dari masyarakat yang membantu stakeholder pemerintah dalam mengatasi adanya alih fungsi lahan di kewilayahan.
12	Tokoh Masyarakat	4,4	Tokoh masyarakat dalam penelitian ini sebagai bagian dari masyarakat yang membantu stakeholder pemerintah dalam mengatasi adanya alih fungsi lahan di kewilayahan.

Pada urutan diatas dapat terlihat bahwa 3 (tiga) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya yang memiliki pengaruh tertinggi dalam menangani alih fungsi lahan di Kelurahan Ciumbuleuit diantaranya Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung; Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung; dan Dinas Cipta Karya, Bina Kontruksi, dan Tata Ruang Kota Bandung. Hal tersebut diurutkan dari nilai mobilisasi masing-masing aktor dalam menangani adanya fenomena alih fungsi lahan di Kelurahan Ciumbuleuit.

Identifikasi formulasi tujuan yang ingin dicapai untuk melakukan penanganan dampak alih fungsi lahan di Kelurahan Ciumbuleuit.

Hasil akhir analisis MACTOR pun menunjukkan tujuan-tujuan utama yang dapat dijadikan program utama dalam menangani alih fungsi lahan di Kelurahan Ciumbuleuit. Dimana, urutan tujuan yang paling utama ditunjukkan pada baris "*degree of mobilisation*". Dampak alih fungsi lahan di Kelurahan Ciumbuleuit akan diatasi dengan mencapai beberapa tujuan yang telah ditetapkan diantaranya Peningkatan Sosialisai Terhadap Masyarakat Terkait Peruntukan Ruang (PSTMTPR), Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk (MAK), Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Mencegah Alih Fungsi Lahan (PKMDMAFL), Peningkatan Pendapatan Masyarakat (PPM), Menekan Pengalih Fungsi Lahan Pertanian Yang Berakibat Kurangnya RTH (MPFLP), Menekan Perumbuhan Perumahan dan Permukiman (MPPP), Meningkatkan Koordinasi Antar OPD (MKAOPD), Peningkatan SDM dalam Pengawaasan Alih Fungsi Lahan (PSDMPAFL), Meminilaisir Tumpang Tindih Kebijakan (MTTK), Meningkatkan Upaya Penegakan Hukum Untuk Pelanggar Peruntukan Lahan (MPHUPPL). Hasil urutan tujuan utama yang berpotensi menjadi program utama dapat dilihat pada Tabel 3. Urutan Tujuan dalam Menangani Dampak alih fungsi lahan di Kelurahan Ciumbuleuit.

Tabel 3. Urutan Tujuan dalam Menangani Dampak Alih Fungsi Lahan Di Kelurahan Ciumbuleuit.

Rangking	Tujuan	Nilai Degree of Mobilisation	Keterangan
1	Peningkatan Kesadaran Masyarakat	23,2	Tujuan ini bermaksud meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencegah adanya alih fungsi lahan yang berdampak negatif bagi wilayah sekitar.

Rangking	Tujuan	Nilai <i>Degree of Mobilisation</i>	Keterangan
2	Peningkatan Sosialisasi Peruntukkan ruang	21,2	Tujuan ini bermaksud meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang rencana tata ruang yang berlaku.
3	Menekan Alih Fungsi Lahan RTH	20,7	Tujuan ini bermaksud mempertahankan adanya ruang terbuka hijau sebagai wilayah resapan air.
4	Meningkatkan Koordinasi	20,4	Tujuan ini bermaksud meningkatkan koordinasi antar aktor sehingga mengurangi adanya miss komunikasi dalam penanganan alih fungsi lahan.
5	Peningkatan SDM dalam Pengawasan	20,1	Tujuan ini bermaksud peningkatan skill sumber daya manusia dalam mengawasi adanya alih fungsi lahan.
6	Meminimalisir Tumpang Tindih Kebijakan	19,5	Tujuan ini bermaksud menekan adanya tumpang tindih kebijakan, sehingga menimbulkan adanya alih fungsi lahan yang tidak terkontrol
7	Meningkatkan Upaya Penegakan Hukum	19,0	Tujuan ini bermaksud menegakkan kebijakan kepada pelanggar sehingga menimbulkan efek jera.
8	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	17,4	Tujuan ini bermaksud meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga mengurangi adanya dampak alih fungsi lahan yang negatif
9	Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk	16,9	Tujuan ini bermaksud menekan adanya urbanisasi
10	Menekan Pertumbuhan Perumahan dan	16,1	Tujuan ini bermaksud menekan adanya kebutuhan perumahan yang begitu pesat.

Rangking	Tujuan	Nilai <i>Degree of Mobilisation</i>	Keterangan
	Permukiman		

Dapat dilihat pada hasil tabulasi diatas bahwa 3 (tiga) tujuan utama yang memiliki nilai ketersetujuan tertinggi yaitu tujuan peningkatan kesadaran masyarakat, peningkatan sosialisasi peruntukkan ruang, dan menekan adanya alih fungsi lahan ruang terbuka hijau. Berarti, ketiga tujuan tersebut dapat dijadikan sebagai program utama dalam menangani dampak alih fungsi lahan di Kelurahan Ciumbuleuit. Tujuan “Peningkatan Kesadaran Masyarakat” memiliki nilai ketersetujuan tertinggi dibandingkan tujuan lainnya artinya aktor yang terlibat dalam penanganan alih fungsi lahan di Kelurahan Ciumbuleuit mengutamakan adanya peningkatan kesadaran masyarakat sehingga dapat membantu stakeholder pemerintah dalam menekan adanya alih fungsi lahan di Kelurahan Ciumbuleuit. Dengan dilakukannya tujuan-tujuan tersebut maka diharapkan di masa yang akan datang dapat mengelola lahan secara berkelanjutan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis MACTOR yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 (tiga) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki pengaruh tertinggi dan 3 (tiga) tujuan utama yang memiliki nilai kesepakatan tertinggi, diantaranya:

- 3 (tiga) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki pengaruh tertinggi dalam menangani dampak Alih Fungsi Lahan di Kelurahan Ciumbuleuit:
 - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini memiliki nilai tertinggi dalam urutan pertama dengan nilai mobilisasi pada Matriks Hubungan Tujuan-Aktor (3MA0) sebesar 39,8. Yang dapat diartikan bahwa aktor tersebut berfungsi sebagai eksekutor atau aktor utama yang menetapkan suatu kebijakan lingkup perencanaan pembangunan serta pengembangan kota.
 - Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini memiliki nilai tertinggi dalam urutan kedua dengan nilai mobilisasi pada Matriks Hubungan Tujuan-Aktor (3MA0) sebesar 32,1. Yang dapat diartikan bahwa aktor ini melakukan pertimbangan teknis pertanahan untuk menghindari adanya alih fungsi lahan pertanian.
 - Dinas Cipta Karya, Bina Kontruksi, dan Tata Ruang Kota Bandung. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini memiliki nilai tertinggi dalam urutan ketiga dengan nilai mobilisasi pada **Matriks Hubungan Tujuan-Aktor (3MA0)** sebesar **20,4**. Yang dapat diartikan bahwa aktor tersebut sebagai pengawas yang dapat melihat kesesuaian ruang dengan rencana tata ruang yang berlaku.
- 3 (tiga) tujuan utama yang memiliki nilai ketersetujuan tertinggi serta dapat dijadikan sebagai program prioritas dalam menangani dampak Alih Fungsi Lahan di Kelurahan Ciumbuleuit, diantaranya:
 - Peningkatan Kesadaran Masyarakat. Tujuan ini memiliki nilai tertinggi dalam urutan pertama dengan nilai *degree of mobilisation* pada Matriks Hubungan Tujuan-Aktor (3MA0) sebesar 23,2. Tujuan ini bermaksud meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencegah adanya alih fungsi lahan yang berdampak negatif bagi wilayah sekitar.
 - Peningkatan Sosialisasi Peruntukkan Ruang. Tujuan ini memiliki nilai tertinggi dalam urutan kedua dengan nilai *degree of mobilisation* pada Matriks Hubungan Tujuan-Aktor (3MA0) sebesar 21,2. Tujuan ini bermaksud meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang rencana tata ruang yang berlaku.
 - Menekan Alih Fungsi Lahan RTH. Tujuan ini memiliki nilai tertinggi dalam urutan ketiga dengan nilai *degree of mobilisation* pada Matriks Hubungan Tujuan-Aktor

(3MA0) sebesar 20,7. Tujuan ini bermaksud mempertahankan adanya ruang terbuka hijau sebagai wilayah resapan air.

Acknowledge

Peneliti mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandung dan masyarakat Kelurahan Ciumbuleuit sebagai responden yang telah membantu dalam penelitian ini. Kepada Universitas Islam Bandung serta Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat sehingga dapat terselesaikannya penelitian ini.

Daftar Pustaka

- [1] Fauzy, A., 2019. Teknis Analisis Berkelanjutan. PT Gramedia Pustaka Utama.
- [2] Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017, 2017. Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- [3] Bappenas. (2020). Metadata Indikator: Pilar Pembangunan Lingkungan.
- [4] Kusumastuti, A. C. (2018). Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan di Kabupaten Pandeglang.
- [5] Rizqi Firianti, W. (2020). Implementasi Kebijakan Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian di Sleman berdasarkan Perspektif Institusionalis. In Jurnal Ilmu Pemerintahan (Vol. 13, Issue 1).
- [6] A. Mubarakah and E. Hendrakusumah, "Pengaruh Alih Fungsi Lahan Perkebunan terhadap Ekosistem Lingkungan," pp. 1–16, 2022.